

**KEDUDUKAN HUKUM PRESIDEN TERHADAP PARTAI POLITIK
PENGUSUNG**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh *Gelar Kesarjanaan*

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ARIE PRATAMA

NIM. 0910111030



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

KEDUDUKAN HUKUM PRESIDEN TERHADAP PARTAI POLITIK PENGUSUNG

Muhammad Arie Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: ariepratama23@yahoo.co.id

Abstract:

The lack of explanation about President position in correlation with political party causing ambiguity between Presiden and Political Party relation (in legal respective). Indonesian constitution in article 6A only stated that "President and Vice President candidates proposed by Political party or combined Political Party poles". The author considered that legal relation only happened at the election process. This research conducted by method yuridis-normatif furthermore, the author believes that Act Number 42 year 2008 on President and Vice President election need rule which prohibite bath President and Vice President to have an structural position or official or official on official in political party.

Keywords: Legal Positions, President, political parties poles, a duplicate post Ban, President of the legal relationship.

Abstraksi:

Kurangnya penjelasan aturan kedudukan hukum Presiden terhadap Partai Politik politik pengusung menyebabkan ketidak jelasan hubungan hukum Presiden dengan Partai Politik, karena didalam Pasal 6A UUD NRI tahun 1945 hanya menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung, sehingga penulis menyimpulkan hubungan hukum yang terjadi hanya pada saat pencalonan Presiden dan/Wakil Presiden, penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Penelitian ini menyimpulkan perlu ada aturan tambahan yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dilarang memiliki jabatan struktural atau jabatan kepengurusan di partai politik.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Presiden, Partai Politik pengusung, Larangan jabatan rangkap, hubungan hukum Presiden.

PENDAHULUAN

Dalam proses pendemokrasian kehidupan tata negara di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) melainkan dipilih langsung oleh rakyat¹ melalui mekanisme pemilihan umum,² maka untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut harus melalui mekanisme partai politik yang telah diatur oleh dasar negara Indonesia yang menjadi pondasi partai politik dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia, mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang mengatur calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dengan adanya pencantuman pasal tersebut menjadikan peran partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan lembaga negara yang ada, sehingga dalam proses pendemokrasian kehidupan ketatanegaraan, partai politik memiliki posisi strategis sebagai *intermediate actor* (aktor penghubung) dalam kekuasaan pemerintahan negara.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden harus melibatkan partai politik karena untuk menjadi seorang calon Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari salah satu partai politik yang telah lolos verifikasi menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum. Dengan diusulkannya calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum, maka secara tidak langsung seorang tersebut menjadi kader partai politik yang mengusungnya, diusulkannya kader dari partai politik menjadi calon atau bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden tentu memilih calon yang lebih loyal terhadap partai politiknya, sehingga akan memiliki ikatan yang kuat dengan partai politik yang mengusulkannya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, terlebih apabila calon yang akan diusulkan menjadi calon atau bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden menduduki jabatan struktural atau kepengurusan didalam partai politik yang mengusulkannya. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan³ dengan Presiden sebagai pengurus partai politik disalah satu partai politik yang mengusulkannya.

¹ Lihat Pasal 6A ayat (1) UUD NRI tahun 1945 Amandemen IV.

² Lihat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 Amandemen IV.

³ John pieris, "*Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden*" Nusa Media, Jakarta, Tahun 2007 Hal. 97

Apabila hal tersebut tidak diatur secara jelas dan terukur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, maka dapat menimbulkan kekaburan hukum yang berkaitan dengan posisi Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin negara yang bekerja untuk rakyat dan bangsa dengan posisi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pengurus partai politik, sehingga perlu adanya aturan hukum yang jelas dan terukur mengatur masalah kepemimpinan Bangsa Indonesia.

MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mencari alasan hukum (*Ratio Legis*) syarat pencalonan Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan bagaimana hubungan hukum antara Presiden dan Wakil Presiden dengan partai politik yang mengusungnya.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran bahan hukum merujuk pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan sejarah (*Historycal Approach*). Pada penelitian ini akan meliputi pasal-pasal yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) .⁴ “kedudukan” berasal dari kata “duduk” yang secara tata bahasa Indonesia dapat diartikan paling tidak dalam enam pengertian. Salah satu diantaranya, tempat pegawai melakukan pekerjaan atau jabatannya. Jika dikaitkan dengan kedudukan hukum maka, “tempat seseorang melakukan pekerjaan jabatan di bidang hukum” bila dihubungkan dengan “kedudukan Hukum Presiden” maka, dapat kita artikan “tempat presiden melakukan pekerjaan jabatan sebagai Presiden dalam jabatan Kepresidenan”.

Ahli hukum tata negara, Sulardi menyatakan dalam bukunya sistem pemerintahan presidensial murni, bahwa Indonesia menganut sistem Presidensial campuran atau quasi⁵, yaitu gabungan dari sistem Presidensiil dan sistem parlementer, sistem ini terbukti dalam fakta riil di Indonesia terdapat seorang Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelum amandemen kedudukan hukum Presiden dalam ciri sistem parlementer dapat dilihat ketika Presiden dipilih oleh MPR berdasarkan suara mayoritas, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen.⁶ Sehingga menegaskan adanya sistem parlementer di Indonesia. Sistem parlementer berikutnya adalah setiap Undang-Undang yang dibentuk harus mendapat persetujuan dari DPR, sesuai dengan pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 23 UUD NRI 1945.⁷

Dengan penjelasan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, mulai Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 tersebut menyatakan secara tidak langsung kekuasaan dan kedudukan Presiden adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, sesuai dengan penjelasan Pasal 4 dan Pasal 8 UUD NRI 1945, maupun ketentuan pasal lainnya yang berhubungan dengan kedudukan hukum Presiden selaku kepala pemerintahan dapat digolongkan kedalam pasal yang lebih khusus dan spesifik lagi. Ini merupakan konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 mengatur tentang

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka , Jakarta, 2009, hal 234.

⁵ John Pieris, Opcit. *hal* 97

⁶ Pasal 6 ayat (2) menyatakan: “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak*”

⁷ Lihat UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen.

kekuasaan pemerintah negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, disatukan dalam kekuasaan pemerintah negara. Sehingga penulis berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah negara meliputi kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dan kedudukan hukum Presiden diatur dengan ditransformasikannya kedudukan hukum Presiden tersebut dalam tugas dan wewenang Presiden.

B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di atur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD NRI 1945.⁸ Didalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara sejak lahir (*natural born citizen*), artinya yang bersangkutan apabila ingin menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, status Kewarganegaraannya bukan didapat dari proses-proses tertentu seperti melalui proses Naturalisasi.

Proses kewarganegaraan lain yang semula pihak bersangkutan memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia, namun, selanjutnya mengatur bahwa "... dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri.." artinya, jika yang bersangkutan terlahir dalam keadaan berkewarganegaraan lain tanpa kehendaknya sendiri, lalu setelah dewasa memilih atas kehendaknya sendiri menjadi berkewarganegaraan Indonesia, dapat dikatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Yang tidak termasuk adalah jika sudah dewasa, dengan kemampuan sadar atas kehendak sendiri menentukan pilihan, maka yang bersangkutan tidak memilih berkewarganegaraan Indonesia padahal baginya memiliki kesempatan untuk itu, maka yang bersangkutan dianggap pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.⁹

⁸ Lihat UUD NRI tahun 1945 Amandemen IV

⁹ Jimmly Ashidiqie, Komentari atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, cetakan pertama, tahun 2009. Hal. 27

Dalam pasal-pasal yang penulis tuliskan diatas menegaskan kembali bahwa syarat tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang. Yaitu, UU Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

B.1. Prosedur Persyaratan Pencalonan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Berdasarkan ketentuan pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 8 menyebutkan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan partai politik, namun dalam Pasal sebelumnya menyatakan bahwa, Pasal 2: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan Efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. dengan adanya Pasal 8 dalam UU No.42 Tahun 2008, maka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai poitik atau gabungan partai politik ini bertujuan agar amanat UUD NRI 1945 pada Pasal 6A ayat 2 tersampaikan.

Adapun syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di atur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10.¹⁰ Dalam Pasal 10 tersebut menyatakan penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme Partai Politik yang ingin mencalonkan calonnya untuk mengikuti Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik juga berhak unutk melakukan kesepakatan dengan partai politik lain apabila calon yang hendak di usung sama, dan berhak untuk menggabungkan diri dengan partai lain apabila mempunyai kesamaan Visi misi. Namun, calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, tidak boleh lagi dicalonkan

¹⁰ Ibid, Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10.

dengan partai politik atau gabungan partai politik lain. Sebagaimana yang telah diatur oleh UU tersebut.

Mengenai kesepakatan antar partai politik diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12¹¹, Pasal 11 menyatakan bahwa “kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas: a. Kesepakatan antar Partai Politik; b. Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Pasangan calon, kesepakatan tersebut dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

C. Alasan Hukum (*Ratio Legis*) syarat pencalonan Presiden diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

C.1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu perwujudan dari salah satu bentuk kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya proses demokrasi. Kebebasan tersebut lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi dengan baik secara formal maupun informal¹². Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah pemenuhan kehidupan berorganisasi yang timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu dalam mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 1 butir pertama menyebutkan, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

¹¹ Ibid

¹² Jimly ashidqie, *kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik, dan mahkamah konstitusi*, konstitusi press, jakarta 2005, hlm 44

¹³ Muchamad ali safa'at, *pembubaran partai politik*, rajawali press, jakarta, hlm 5

¹⁴ Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

C.2. Alasan Hukum (*Ratio Legis*) Syarat Pencalonan Presiden Diusulkan Oleh Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa “calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan umum” adalah sebuah konsekuensi logis dari Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu Pasangan secara langsung oleh rakyat” dengan adanya pemilihan yang dipilih oleh rakyat secara *one man, one vote* maka, mendorong partai politik sebagai wadah penampung aspirasi rakyat, untuk mengambil hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pengusulan presiden dan wakil Presiden ini tidak dapat lepas dari sistem politik Indonesia yang mempunyai Suprastruktur dan Infastruktur Politik didalamnya. Sehingga bila dilihat dari sistem politik Indonesia mayoritas mutlak dalam fakta riilnya, legislatif atau DPR berasal dari partai politik. Sehingga, ketika memutuskan untuk pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. Maka, sudah tentu akan menyatakan untuk diusulkan oleh partai politik. Ini terbukti, ketika pengusulan pendapat tersebut belum ada satu pendapatpun dari penulis lihat dalam naskah komprehensif yang menyatakan, keberatan atas usulan. Bahwa, calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari Partai Politik dan gabungan Partai Politik.

Penulis berpendapat bahwa ada alasan terjadinya tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut, bertujuan untuk mempermudah pengaturan lebih spesifik. Pengejawantahan dari pasal 6A ayat (2) tersebut, yang menyatakan bisa melakukan gabungan partai politik tidak hanya sekedar kesamaan Visi dan Misi untuk mengusulkan salah satu calon, melainkan, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu minimal memenuhi persyaratan perolehan kursi sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota legislatif atau DPR sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga apabila tidak memenuhi persyaratan

tersebut mau tidak mau, calon yang hendak diusulkan harus menggabungkan diri ke partai lain, dengan tujuan memenuhi kuaota yang di atur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusional nomor perkara 007/PUU-II/2004 Tentng Mekanisme Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik UUD NRI 1945 membedakan antara Hak Konstitusional Warga Negara dengan Hak Konstitusional Partai Politik, dengan adanya pengaturan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*” dengan demikian Mahkamah Konstitusi menafsirkan terdapat perbedaan hak antara Hak warga negara dengan Hak Konstitusional Partai politik karena bila dilihat lebih mendetail menurut pendapat penulis, Partai Politik merupakan sebuah badan hukum (*Recht Persoon*) sehingga memiliki hak yang sama seperti Manusia (*Naturlijk Persoon*) dengan demikian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Hak Partai Politik sebagai *Recht Persoon* yang telah di atur dalam UUD NRI 1945 untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Baik itu diusulkan oleh Partai Politik, maupun oleh gabungan Partai Politik.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya dengan Nomor Perkara: 054/PUU-II/204 Tentang calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan kembali menegaskan hal yang serupa dengan hasil putusan perkara sebelumnya. Hal serupa juga terjadi dalam Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 057/PUU-II/2004 Tentang Mekanisme Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai Politik, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali dengan membedakan antara Hak Konstitusional untuk menjadi seorang Presiden atau Wakil Presiden dengan Hak Konstitusional mengenai Prosedur Pencalonan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Karena setiap warga negara berhak untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945,

namun untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yaitu harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

D. HUBUNGAN HUKUM PRESIDEN DENGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA.

Hubungan hukum dikaitkan dengan hubungan hukum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Wakil Presiden terhadap Partai Politik pengusung adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yaitu Presiden dengan Partai politik yang mengusung, yang telah memiliki kesepakatan bersama. Hubungan hukum Presiden dan Wakil Presiden dengan Partai Politik diatur dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta-peserta pemilihan umum”.

D.1. Sistem Politik di Indonesia.

Dalam sistem Politik di Indonesia, penulis melihat dan membagi dalam sistem pemerintahan didalam dan diluar sistem pemerintahan, Prof. Bagir manan menjelaskan dalam buku lembaga kepresidenan¹⁵, permasalahan politik yang ada di Indonesia dapat diselesaikan dengan memahami tentang struktur serta sistem politik yang ada, salah satunya adalah suprastruktur politik dan infrastruktur politik, karena dua hal tersebut akan saling berhubungan dengan kehidupan politik yang ada di Indonesia.

Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktifitasnya dapat memengaruhi baik secara langsung atau tidak kepada lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaan masing-masing. Infrastruktur politik terdiri dari lima komponen atau unsur yaitu:

1. Partai politik;
2. Golongan Kepentingan;
3. Kelompok penekan;
4. Media atau alat komunikasi politik;
5. Tokoh Politik

¹⁵ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII, Yogyakarta, Tahun 2006, Hal. 16

Sedangkan suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara. sistem politik Indonesia melalui suprastruktur dan Infrastruktur politik Indonesia. maka penulis berpendapat bahwa hubungan Presiden dengan partai politik merupakan hubungan yang saling berhubungan namun tidak saling terikat satu dengan yang lainnya.

E. HUBUNGAN HUKUM PRESIDEN TERHADAP PARTAI POLITIK PENGUSUNG.

E.1. Eksistensi Partai Politik dalam Konstitusi.

Dilihat dari supremasi Partai Politik di dalam UUD NRI 1945 maka akan banyak peran dari partai politik yang ada dalam UUD NRI 1945 tersebut, penulis berpendapat Konstitusi tersebut merupakan buah karya politik dalam bentuk hukum, karena mayoritas penyusun dalam peraturan perubahan UUD NRI 1945 adalah para politisi yang merepresentasikan partai politik, dilihat dari sejarah perubahan konstitusi secara runtut dalam UUD NRI 1945 akan terlihat perubahan tersebut memperkuat posisi dan peran DPR. Karena mayoritas dari DPR atau legislatif tersebut merupakan representasi atau perwakilan dari partai politik.

Banyak perubahan yang dilakukan, contoh kecil terjadi dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik. Selanjutnya dalam Pasal 22E ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik. Sehingga penulis berpendapat bahwa calon wakil rakyat itu dari baik di Legislatif maupun Eksekutif dikuasai oleh partai politik. Sehingga peran partai politik sangat strategis dalam suprastruktur politik di Indonesia.

Semua ketentuan tersebut adalah norma yang secara eksplisit menyebutkan posisi partai politik dalam UUD NRI Indonesia, dikaitkan dalam posisi implisit, maka peran dan posisi partai politik akan semakin terlihat terutama dalam penguatan peran di DPR yang semua anggota merupakan representasi dari partai politik, sehingga ada banyak perubahan yang terjadi apabila dilihat dari sejarah perubahan UUD NRI 1945, namun

perubahan tersebut sama sekali tidak menyebutkan secara eksplisit posisi dan peran partai politi di tingkat konstitusi.

E.2. Hubungan Hukum Presiden terhadap Partai Politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hubungan Hukum Presiden dengan Partai Politik Pengusung hanya akan dapat dilihat menurut UUD NRI pasal 6A yang mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari Pasangan Presiden yang dipilih langsung oleh Rakyat.¹⁶

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon, pasal 51 ayat 1 UU MK menegaskan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU. Namun, UUD NRI 1945 telah membedakan hak konstitusional untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dan hak konstitusional prosedur pencalonan sebagai presiden atau wakil presiden, setiap warga negara berhak menjadi presiden dan wakil presiden sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 UUD NRI 1945, namun untuk dapat dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 6A UUD NRI 1945 yang tata cara pencalonan diatur dalam pasal 6A UUD 1945 yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, hanya partai politik yang memiliki konstitusional untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, meskipun seorang mempunyai hak konstitusional untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden menurut UUD NRI 1945, namun, jika tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu,

¹⁶ Lihat Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945

maka hal tersebut menjadi *in casu* tidak mempunyai hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6A ayat 2 UUD NRI1945.

Penulis Berpendapat bahwa Hubungan Hukum Presiden dengan Partai Politik hanya akan terjadi sebatas sebelum pelaksanaan pemilu, sedangkan Hubungan Presiden dengan Partai Politik sesudah Pemilu. Apabila calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut terpilih. Maka, hubungan tersebut menurut pendapat penulis merupakan hubungan Politik Presiden dengan Partai politik pengusung atau partai Politik yang mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Karena penulis mengkaji hubungan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan seperti UUD NRI 1945 hanya mencantumkan Pra Pemilu yaitu berupa syarat Administrasi yang harus dilewati Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

E.4. Hubungan Presiden menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga mengatur hubungan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Partai Politik yang mengusung, didalam Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian pengunduran diri sebagai pejabat negara yang telah dimaksudkan oleh Pasal 6 ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dalam surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali sesuai aturan yang telah dimuat oleh pasal 6 ayat (2). Surat pengunduran diri tersebut disampaikan melalui partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU sebagai dokumen Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁷

¹⁷ Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Apabila pejabat pemerintah yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus meminta Izin kepada Presiden Republik Indonesia.¹⁸ surat izin tersebut akan dijadikan dokumen Persyaratan pencalonan Presiden atau Wakil Presiden.¹⁹

Dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.²⁰

Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai yang bersangkutan²¹ atau dengan kesepakatan gabungan partai politik yang mengusulkan calon tersebut²² sesuai dengan musyawarah dan demokratis serta terbuka.²³ Namun ada persyaratan yang lebih lanjut yaitu calon yang sudah diusulkan oleh partai politik dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh diajukan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.²⁴

Dengan adanya hubungan tersebut maka, pasangan calon tersebut akan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pendaftaran tersebut di tanda tangani ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain yang setara.²⁵

Dalam hal pelaksanaan kampanye terdiri atas partai politik dan orang seorang serta organisasi penyelenggara kegiatan. Berarti penulis

¹⁸ Ibid. Pasal 7 ayat (1)

¹⁹ Ibid. Pasal 7 ayat (2)

²⁰ Ibid. Pasal 9

²¹ Ibid. Pasal 10 ayat (1)

²² Ibid. Pasal 10 ayat (2)

²³ Ibid. Pasal 10 ayat (3)

²⁴ Ibid. Pasal 10 ayat (4)

²⁵ Ibid. Pasal 13

berpendapat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik, yang melakukan kampanye di setiap kota adalah orang-orang yang menjadi pendukung calon tersebut dan kader-kader partai yang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan membentuk tim Kampanye Nasional.²⁶ Sehingga dalam pembentukan Tim sebagaimana yang diatur dalam peraturan Tim tersebut harus berkordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

E.5. Eksistensi Presiden dalam Partai Politik

Dalam hubungan calon dengan partai politiknya tidak ada aturan secara terikat dengan calon yang diusung oleh partai politik tersebut. karena hubungan calon dengan Partai Poltik hanya terjadi saat masa pemilihan calon atau pemilihan umum maupun pemilihan umum tingkat daerah.

Perpindahan pejabat publik ke partai politik yang lain tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi dalam calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, karena dari segi pengaturan memang belum mengatur hal tersebut. Sebaiknya Pejabat publik yang di usung oleh partai politik tidak berpindah-pindah partai, karena sedikit banyak dapat mengganggu kinerja partai tersebut. selain itu juga, kader Partai Politik tersebut jika dilihat dalam etika pejabat negara kurang memiliki etika dalam berpolitik, karena konsekuensi dari pejabat negara yang diusung oleh partai politik adalah menjalankan tujuan yang telah disepakati calon dengan partai politik. sehingga penulis beranggapan, kader yang berpindah partai politik setelah menjadi pejabat publik merupakan kader yang tidak konsekuen dengan pilihannya dan hanya mementingkan kepentingan pragmatis pribadi serta jauh dari kepentingan masyarakat, diakibatkan pejabat publik tersebut terus sibuk mengurus pribadinya.

E.6. Hubungan Presiden terhadap Partai Politik pengusung jika Partai Politik dibubarkan atau Presiden pindah Partai Politik.

Hubungan Presiden dengan partai politik pengusung sudah selesai ketika calon tersebut menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, karena menurut UUD NRI 1945 Pasal 6A Ayat (2), Partai Politik hanya

²⁶ Ibid. Pasal 35

merupakan wadah menyalurkan kader terbaik partai untuk menduduki jabatan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden, karena dalam Pasal 6A ayat (2) tersebut calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diusulkan oleh Partai Politik maupun gabungan Partai Politik. Menurut Jimly Ashidique²⁷, pembubaran Partai Politik harus dibedakan dari persoalan hukum yang menyangkut pertanggung jawaban pribadi orang per orang, pengurus, atau anggota partai yang bersangkutan. Sehingga apabila suatu partai politik tersebut dibubarkan, akan menimbulkan permasalahan terhadap lembaga perwakilan yang dipilih dari partai tersebut, apakah berhenti atau tetap menjadi anggota lembaga tersebut. karena ada dua pandangan, yang pertama, seorang calon sebagai anggota lembaga perwakilan adalah karena pencalonan melalui suatu partai politik dan dipilih oleh konstituen partai politik. dengan dibubarkannya Partai Politik yang bersangkutan, anggota yang menjadi perwakilan yang berasal dari partai politik itu kehilangan legitimasinya.²⁸

Jika dilihat dari sudut pandang jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan tidak sama, hal tersebut tidak berlaku dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Menurut pendapat penulis, dari segi pengaturan jelas berbeda, untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik hanya boleh mengusulkan atau mengusung calonnya untuk mengikuti pemilu Presiden dan Wakil Presiden, setelah calon tersebut berhasil merebut dan menduduki jabatan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memiliki hubungan dengan partai politik yang mengusungnya.

Menurut Jimly Ahidique, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6A Ayat (2) tersebut sudah menunjukkan bahwa peserta pemilihan umum adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai Politik hanya merupakan pihak yang mencalonkan. Setelah dinyatakan sebagai calon,

²⁷ Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH.,MH, Pembubaran Partai Politik, Jakarta, Rajawali Press. Hal.391

²⁸ Ibid. Hal.393

Pasangan calon itu sendiri yang akan menjadi subjek hukum dalam Proses selanjutnya.²⁹

Berdasarkan kedudukan tersebut, Jimly Ashidique menyatakan bahwa pada saat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tidak terdapat hubungan hukum lagi dengan Partai Politik, sehingga jika partai politik tersebut dibubarkan, maka tidak menimbulkan akibat terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden³⁰ karena proses partai politik sudah selesai pada saat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, hal tersebut berbeda dengan anggota DPR dan DPRD, menurut Muchamad Ali Safa'at, jika dilihat dari sisi hukum anggota DPR dan DPRD tidak hanya mewakili partai politiknya, tetapi juga mewakili rakyat secara keseluruhan. Di lain sisi, terpilihnya seseorang menjadi anggota DPR dan DPRD, seseorang tersebut tidak hanya memiliki hubungan hukum dngan partai politiknya, tetapi juga memiliki hubungan dengan negara, yaitu lembaga DPR dan DPRD, sehingga Muchamad Ali Safa'at menyatakan dengan hilangnya status anggota partai politik karena pembubaran, tidak dapat dengan sendirinya berakibat hilangnya status keanggotaan dalam lembaga perwakilan.³¹

Secara normatif apabila Partai Politik yang mengusulkan calon untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dibubarkan, maka tidak akan berimbas terhadap Presiden dan Wakil Presiden karena hubungan secara hukum Presiden dengan Partai Politik sudah selesai pada saat calon tersebut menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Jika dilihat dari sejarah kedudukan Presiden, penulis belum menemukan Presiden dan Wakil Presiden pada saat menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden melakukan pindah Partai Politik, namun jika hal tersebut terjadi, secara hukum tidak akan berakibat apa-apa, karena hubungan dengan partai politik itu sudah selesai saat calon Presiden dan Wakil Presiden menjabat Presiden dan Wakil Presiden. Jika dilihat secara politis tentu akan berakibat pada Presiden dan Wakil Presiden yang

²⁹ Ibid. Hal 393

³⁰ Ibid. Hal 394

³¹ Ibid. Hal 394

diusulkan oleh partai politik tersebut, karena Presiden dan Wakil Presiden akan kehilangan dukungan dari partai politik yang mengusungnya, diakibatkan oleh perpindahan Presiden dari partai politik yang mengusungnya, kehilangan dukungan tersebut terjadi didalam anggota parlemen atau anggota DPR yang berasal dari Partai Politik pengusung, sehingga berakibat pada stabilitas pemerintahan karena akan terjadi konflik politik antara Presiden dan Anggota Parlemen yang berasal dari Partai Politik yang mengusungnya.

F. PERAN DAN POSISI PARTAI POLITIK DIDALAM PEMERINTAHAN DAN DILUAR PEMERINTAHAN DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI.

Peran partai politik dalam pemerintahan memang sangat dibutuhkan, terbukti saat didalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) yang menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. dilihat dari sudut pandang demokrasi, partai politik berperan untuk mendukung setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah eksekutif atau Presiden, dan bila dilihat kebelakang, Presiden dan Wakil Presiden memang berasal dari Partai politik.

Dari sudut pandang etika demokrasi, politik diluar pemerintahan adalah kegiatan parlementarian yang paling terhormat, Norma politik oposisi menempati kedudukan tertinggi dalam etika demokrasi karena melalui norma itulah demokrasi dilindungi dari ancaman mayoritarianisme. Tendensi monopoli kebenaran berdasarkan prinsip *the winner takes all* dalam politik mayoritarisme, dapat dikendalikan melalui Prinsip falibilisme (falibilism) di dalam etika demokrasi. Prinsip itu meyakinkan bahwa perwakilan politik tidak identik dengan penyerahan kedaulatan rakyat. Perwakilan politik itu bersifat temporer, sedangkan kedaulatan rakyat bersifat permanen. Oleh karena itu pemberian suara melalui pemilu tidak identik dengan penyerahan kedaulatan. Bahkan lebih dari itu falibisme memastikan bahwa demokrasi justru bertumpu pada pandangan bahwa kesalahan dan penyimpangan merupakan posibilitas tertinggi dari

kekuasaan, dan oleh karena itu kritik dan oposisi harus menjadi permanen dalam kehidupan demokrasi.³²

Politik diluar pemerintahan merupakan nilai yang secara tidak langsung melekat dalam konsep demokrasi itu sendiri, bila dilihat dan dipahami sebagai wilayah transaksi politik yang terbuka, maka dapat dengan sendirinya setiap hasil transaksi tersebut membuka peluang untuk dipersoalkan ulang. Politik diluar pemerintahan (oposisi) dimaksudkan untuk menjamin demokrasi dapat bekerja di wilayah sekuler, dengan tujuan untuk memastikan kebenaran adanya monopoli atas alasan apapun, monopoli terhadap kekuasaan tidak boleh terjadi. Sehingga tugas penting dari politik dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya dengan menjaga Netralitas ruang publik yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan uraian, analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan hukum (*Ratio Legis*) syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik merupakan sebuah konsekuensi dari pembentukan pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu Pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Hubungan hukum presiden dengan partai politik atau gabungan partai politik terjadi sebelum dan saat pelaksanaan pemilihan umum, Hubungan Hukum Presiden dalam Partai Politik menurut putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan Hak Konstitusional Partai Politik yang telah di atur dalam UUD NRI 1945³³

DAFTAR PUSTAKA

³² Gillermo O'Donnel dan Philips Schmitter, "*Transstitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*" (Baltimore, Johns Hopkins University Press) 1986, dalam Syamsu Rizal Panggabean "Pengalaman Demokratisasi Negara lain", hal. 43

³³ Lihat ikhtisar putusan perkara nomor 057/PUU-II/2004 tentang mekanisme pengusulan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik, Mahkamah Konstitusi.

- Bagir Manan, **Lembaga Kepresidenan**, FH UII, Yogyakarta, tahun 2006.
- John pieris, **“Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden”** Nusa Media, Jakarta, Tahun 2007.
- Jimly ashidiqie, **kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik, dan mahkamah konstitusi**, konstitusi press, jakarta 2005.
- Jimmly Ashidiqie, **Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sinar Grafika, cetakan pertama, tahun 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Muchamad ali safa’at, **pembubaran partai politik**, rajawali press, jakarta.
- Gillermo O’Donnel dan Philips Schmitter, **“Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies”** (Baltimore, Johns Hopkins University Press) 1986, dalam Syamsu Rizal Panggabean “Pengalaman Demokratisasi Negara lain”.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.
- Ikhtisar putusan perkara nomor 057/PUU-II/2004 tentang mekanisme pengusulan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik, Mahkamah Konstitusi.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi.

Website:

- <http://m.bola.viva.co.id/news/read/215914-aturan-bagi-politisi-kutu-loncat> di akses pada tanggal 26 mei 2013 jam 18:37
- <http://news.liputan6.com/read/531923/tjahjo-kumolo-bibit-waluyo-tak-pamit-ke-pdip> di akses pada tanggal 27 mei 2013 jam 07:54 WIB